

Penguatan Kepemimpinan dan Kesadaran Kolektif dalam Perlindungan Hak Pekerja Pemeliharaan Jalan

Nelly Agustina Widyaningrum
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
email: neliagustina262@gmail.com

Abstract

Informal sector workers, particularly in construction and road maintenance, remain highly vulnerable to job insecurity and the non-fulfillment of normative labor rights. This practice-based study aims to analyze the problems faced by daily wage workers from a generalist social work perspective and to implement interventions at the micro, mezzo, and macro levels. The intervention was conducted under the supervision of the Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) with a group of road maintenance workers in the Special Region of Yogyakarta, Indonesia. Identified issues included role conflict and psychosocial pressure experienced by the team leader (micro level), limited collective awareness regarding normative labor rights and trade unions (mezzo level), and weak implementation of labor policies, particularly concerning social security coverage, written employment contracts, and job training (macro level). The intervention employed a generalist social work approach through assessment, planning, educational sessions, focus group discussions, and policy advocacy in the form of a policy brief and institutional communication. The results indicate improved leadership role understanding, increased collective awareness of labor rights, and the initiation of advocacy efforts toward relevant authorities. These findings highlight the importance of a multi-level social work intervention framework to strengthen individual capacity, collective empowerment, and systemic protection in promoting workers' welfare.

[Pekerja sektor informal, khususnya pada bidang konstruksi dan pemeliharaan jalan, merupakan kelompok yang rentan terhadap ketidakpastian kerja dan tidak terpenuhinya hak-hak normatif. Intervensi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pekerja harian lepas dalam perspektif pekerjaan sosial generalis serta mengimplementasikan intervensi pada level mikro, mezzo, dan makro. Studi dilakukan di bawah pendampingan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) terhadap kelompok pekerja pemeliharaan jalan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang ditemukan meliputi konflik peran dan tekanan psikososial pada ketua tim (mikro), rendahnya kesadaran kolektif terkait hak normatif dan serikat pekerja (mezzo), serta belum optimalnya implementasi kebijakan ketenagakerjaan terutama terkait jaminan sosial, kontrak kerja tertulis, dan pelatihan kerja (makro). Metode intervensi menggunakan pendekatan praktik pekerjaan sosial generalis melalui asesmen, perencanaan, pelaksanaan edukasi, *Focus Group Discussion* (FGD), serta advokasi kebijakan melalui *policy brief* dan audiensi. Hasil intervensi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peran kepemimpinan, tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai hak normatif pekerja, serta inisiasi komunikasi advokatif dengan pihak terkait. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan multi-level dalam praktik pekerjaan sosial untuk memperkuat kapasitas individu, kelompok, dan sistem dalam mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.]

Keywords: *Informal Workers, Normative Labor Rights, Generalist Social Work, Labor Union, Policy Advocacy.*

A. Pendahuluan

Sektor informal di Indonesia masih mendominasi struktur ketenagakerjaan nasional dan menyimpan berbagai persoalan perlindungan kerja. Pekerja pada sektor konstruksi, perkayuan, dan kelistrikan termasuk kelompok yang memiliki risiko kecelakaan kerja tinggi, namun belum seluruhnya memperoleh jaminan sosial dan kepastian hubungan kerja. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi ketenagakerjaan dan implementasinya di lapangan.

Secara normatif, perlindungan pekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan hak atas upah layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kontrak kerja yang jelas, serta hak berserikat. Namun dalam praktiknya, pekerja harian lepas terutama yang berada dalam sistem alih daya atau hubungan kerja berjenjang sering kali tidak memperoleh hak-hak tersebut secara utuh. Ketiadaan kontrak tertulis, tidak adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja, serta minimnya pelatihan kerja menjadi indikasi lemahnya implementasi kebijakan.

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan psikososial. Berdasarkan hasil assesment, para pekerja merupakan warga sekitar wilayah jalan provinsi yaitu dari Dusun Imorejo, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi. Mereka mendapatkan pekerjaan dari mandor yang bekerja di Dinas PU Provinsi, kontrak kerja selama satu tahun dan dapat diperpanjang apabila Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tidak memiliki proyek pekerjaan yang lebih besar. Mereka mendapatkan upah harian lepas sebesar Rp.100.000 yang dibayarkan setiap dua minggu satu kali, fasilitas kerja yang diperoleh berupa perlengkapan pelindung diri (APD), diantaranya helm, rompi dan sepatu boots serta peralatan kerja sesuai fungsinya.

Pelaksanaan tugasnya para pekerja tidak dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tekanan, mereka hanya diminta untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Sebagian hak-hak pekerja sudah terpenuhi, seperti hak upah minimum, cuti kerja dan perlengkapan pelindung diri. Namun hak jaminan sosial belum terpenuhi, pekerja mengaku memiliki BPJS Kesehatan, tetapi selama bekerja yang dimulai dari bulan Maret 2025 hingga saat ini mereka tidak mendapatkan perlindungan asuransi yang ditanggung oleh pemberi kerja.

B. Kerangka Konseptual dan Metode Intervensi

Intervensi ini menggunakan pendekatan praktik pekerjaan sosial berbasis lapangan (*field practice*). Lokasi praktik berada di Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Daerah Istimewa Yogyakarta – Jawa Tengah, Jl. Sukun Raya, Modalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak dalam pendampingan pekerja sektor informal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara mendalam dengan pekerja pencatat listrik sebagai klien utama. Kedua, observasi partisipatif terhadap kondisi kerja dan *home visit* ke pekerja. Ketiga analisis BPSS serta analisis kebijakan. Keempat diskusi kelompok terarah (FGD) bersama pekerja dan pengurus SERBUK.

Intervensi yang dilakukan dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan generalis pekerjaan sosial, yang memandang permasalahan klien secara menyeluruh melalui tiga level praktik, yaitu mikro (praktikkan menggunakan teori konseling), mezzo (praktikkan menggunakan teori pemberdayaan atau *empowerment theory*), dan makro (praktikkan menggunakan teori konflik sosial dan konsep advokasi sosial). Pendekatan ini memungkinkan pekerja sosial untuk tidak hanya berfokus pada perubahan individu, tetapi juga pada lingkungan sosial dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan klien.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Assesment

a. Aseessment Mikro

Berdasarkan asesment mikro diperoleh informasi klien sebagai berikut:

Tabel 1. Aseessment Mikro

Identifikasi Klien	
Nama	Ediyanto
Tempat, tahun lahir	Sumberagung, 1980
Usia	45 tahun
Agama	Islam
Jenis kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Pemotong rumput dan ketua tim
Tinggi dan berat badan	165 cm, 70 kg
Warna kulit	Sawo matang cenderung gelap
Status	Menikah
Alamat	Imorejo, Wonokerto, Turi, Sleman
BPSS	
Kondisi Biologis	
Jenis Kelamin	Laki- laki
Berat badan	70 kg
Tinggi badan	165kg
Warna kulit	Sawo matang
Warna bola mata	Hitam
Bentuk hidung	Pesek
Bentuk wajah	Bulat
Warna rambut	Hitam, cepak/ pendek
Postur tubuh	Agak berisi dan tinggi sedang
Jaminan sosial	BPJS Kesehatan PBI
Kondisi Psikologis	
Komunikatif dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan dengan terbuka setelah beberapa kali bertemu dengan praktikkan	
Sedikit sulit untuk berinteraksi dengan orang baru karena pada pertemuan pertama, klien belum mau menjawab pertanyaan wawancara secara leluasa	
Ramah, setelah beberapa kali pertemuan beliau ternyata mudah diajak berkomunikasi dan memberi izin untuk didatangi lagi dalam intervensi lanjutan	
Terbuka saat bercerita dan menceritakan kondisi apa adanya serta mau menceritakan anggota keluarga dan kegiatan sehari-harinya	
Nada bicara sedikit keras, terkadang ada jedanya dan mau menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung	
Setelah beberapa kali pertemuan, klien cukup responsif dan memiliki rasa ingin tahu dengan menanyakan beberapa hal pada saat dilakukan intervensi, seperti saat memberikan sosialisasi.	

Kondisi Sosial

Memiliki dua anak, anak pertama sedang berkuliah dan anak kedua masih SD
Memiliki pekerjaan sampingan yaitu bekerja di kebun salak saat hari libur atau di luar jam kerja
Lebih sering mengobrol dengan teman kerjanya saat jam istirahat dibandingkan bermain HP
Sering mengikuti kegiatan gotong royong di dusunnya/ lingkungan tempat tinggalnya.

Kondisi Spiritual

Beragama Islam
Merokok untuk mengisi waktu luang di jam istirahat
Memiliki penerimaan terhadap kondisi yang sedang dialami dengan mengatakan bahwa pekerjaannya saat ini lebih dari cukup dan tidak merasa ada kendala dalam bekerja

Sumber: Data Praktikkan, 2025.

b. Asessment Mezzo

Berdasarkan asessment mezzo diperoleh informasi klien sebagai berikut:

Tabel 2. Asessment Mikro

Perincian Kondisi Klien dalam Satu Tim Kerja
Jumlah pekerja dalam satu tim sebanyak 6 orang dan mayoritas berasal dari satu wilayah yang sama yaitu Dusun Imorejo, Wonokerto, Turi, Sleman.
Anggota tim tersebut mayoritas berusia 40-50an tahun diantaranya yaitu bapak Edi, Daroji, Junaedi, Aris, Paryono dan pak Hardono. Mereka bekerja sejak akhir bulan Maret 2025, bapak Paryono dan Hardono bekerja mulai bulan November 2025 dan mereka berdua berasal dari dusun Nganggring, Wonokerto, Turi.
Pertemuan ke 1 dan 2 bapak Daroji dan Aris yang lebih banyak menjawab pertanyaan wawancara, mereka komunikatif dan mau menjawab pertanyaan.
Pada pertemuan ke 3 bapak Junaedi dan Edi sudah mulai mau mengobrol dan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan kepada para pekerja. Namun, dua pekerja baru yaitu bapak Paryono dan Hardono belum mau ikut mengobrol.
Bapak Daroji sejak pertemuan pertama mau menjawab pertanyaan wawancara dan dapat menceritakan pengalamannya dengan terbuka. Bapak Aris merupakan pekerja baru yang pada saat pertemuan pertama baru bekerja selama 2 minggu, sehingga beliau mengatakan belum memiliki banyak pengalaman
Bapak Edi merupakan ketua tim, tetapi saat pertama bertemu beliau tidak mau diwawancarai dan meminta bapak Daroji untuk menjawab pertanyaan. Rentang 30 usia para pekerja cukup bervariasi, pekerja paling muda berusia sekitar akhir 30an sedangkan pekerja lansia berusia 50 tahun.
Hubungan antar pekerja terlihat kompak, mereka selalu beristirahat di tempat yang sama dan ketika salah satu pekerja sedang pergi saat jam istirahat, pekerja lain mau menghubungi melalui telepon bahwa ada praktikkan yang ingin mewawancarai dan menemui mereka.

Sumber: Data Praktikkan, 2025.

c. Asessment Makro

Berdasarkan asesment mikro keenam pekerja belum memiliki pengetahuan tentang hak-hak normatif bagi pekerja, belum mengetahui tentang serikat pekerja dan manfaat berserikat. Kemudian mereka juga tidak mendapatkan jaminan sosial (asuransi), seperti BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja (Dinas PU Provinsi).

Dua pekerja mengatakan bahwa sejak awal diterima kerja pemberi kerja menyampaikan bahwa mereka tidak mendapat asuransi selama bekerja. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, pekerja harus membayar biaya pengobatan menggunakan dana pribadi. Para pekerja mengatakan tidak mendapatkan kontrak kerja secara tertulis, mereka juga belum pernah mendapatkan pelatihan kerja dan hanya satu kali dikumpulkan untuk pengarahan kerja.

2. Gambaran Permasalahan Berdasarkan Temuan di Lapangan

Berdasarkan prioritas masalah temuan di lapangan, pada level mikro ditemui masalah berupa klien mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya sebagai ketua tim kerja akibat konflik peran dan tekanan psikososial yang muncul dari tuntutan kepemimpinan di tengah relasi sosial yang setara dengan anggota tim. Di level mezzo ditemui masalah berupa Kelompok kerja belum memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap hak-hak normatif pekerja dan keberadaan serikat pekerja sehingga menerima kondisi kerja tanpa jaminan sosial, kontrak kerja tertulis dan pelatihan kerja. Di level makro ditemui masalah berupa Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan

hak-hak normatif bagi pekerja. Diantaranya jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan), kontrak kerja tertulis dan pelatihan kerja.

3. Pelaksanaan Intervensi

a. Intervensi Mikro

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan, tujuan dari intervensi mikro adalah meningkatkan kemampuan klien dalam memahami dan menjalankan perannya sebagai ketua tim kerja dan mengelola konflik peran serta tekanan psikososial yang muncul dalam relasi sosial dengan anggota tim. Hasil pelaksanaan intervensi dengan memberikan edukasi dan konseling individual terlaksana sesuai rencana yaitu dilakukan sebanyak empat kali sesi pertemuan. Namun, beberapa pertemuan dengan klien dilakukan secara terbatas karena menyesuaikan waktu kerja klien sehingga metode diskusi bersama klien disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pada saat kegiatan intervensi klien terlibat dalam proses refleksi dan mulai menunjukkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan, diantaranya yaitu mengenai perbedaan peran sebagai ketua tim kerja dan peran sebagai rekan sejawat anggota tim kerja. Klien dapat membedakan posisi dan kondisi untuk menentukan keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya, capaian tersebut berdampak terhadap kepercayaan diri klien sebagai ketua tim kerja serta dapat mengurangi tekanan psikososial, terutama beban kecemasan yang dirasakan oleh klien.

Dampak intervensi pada lingkungan kerja klien dapat terlihat dari perubahan pada pola komunikasi dalam tim kerja, pada sesi intervensi ke empat klien mulai berani memimpin anggota tim kerjanya untuk melakukan sesi FGD (*Focus Group Discussion*). Sesi tersebut klien sebagai juru bicara dapat mengajak teman-teman klien untuk merefleksikan bagaimana pola komunikasi dalam tim kerja yang selama ini telah mereka lakukan. Kemudian klien juga

mendorong teman-temannya untuk aktif dalam sesi diskusi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa klien mulai berani berbicara di depan anggota tim kerjanya tanpa merasa canggung dan sungkan. Selain itu, klien dapat memosisikan diri sebagai pemimpin dengan percaya diri dampaknya terhadap lingkungan kerja dapat menciptakan kondisi kerja yang disiplin, mengurangi kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi secara terbuka antara ketua tim dan anggota tim kerja.

b. Intervensi Mezzo

Intervensi mezzo bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kelompok pekerja terhadap hak-hak normatif pekerja. Kegiatan intervensi dilakukan dengan memberikan edukasi kelompok dan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) bersama kelompok pekerja sebanyak empat kali sesi pertemuan. Materi edukasi yang disampaikan diantaranya yaitu mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), bentuk-bentuk hak-hak normatif pekerja, ciri-ciri ketidakadilan di tempat kerja, pentingnya komunikasi dalam tim kerja, cara membuat serta manfaat jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) dan pengenalan serikat pekerja.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman kelompok pekerja yang ditandai dengan mulai memahami hak-hak normatif yang belum terpenuhi. Pekerja dapat mengidentifikasi perlengkapan K3 yang telah didapatkan atau belum didapatkan, pekerja dapat merefleksikan bagaimana komunikasi dalam tim kerja serta memiliki rasa ingin tahu terhadap tata cara pembuatan dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja mulai memahami adanya serikat pekerja sebagai wadah

perlindungan bagi pekerja dan menunjukkan keingintahuan terhadap tujuan dan kegiatan-kegiatan serikat pekerja.

Selain peningkatan pengetahuan, intervensi yang telah dilakukan juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran kolektif yang terlihat dari keaktifan diskusi bersama antara kelompok pekerja dengan praktikkan. Melalui diskusi hak-hak normatif yang seharusnya didapatkan oleh pekerja tetapi pada kenyataannya pekerja belum sepenuhnya mendapatkan hak tersebut. Pekerja mulai menyadari adanya kesenjangan hak normatif bagi pekerja yang belum diberikan oleh pemberi kerja.

Secara keseluruhan Intervensi mezzo memberikan dampak awal bagi kelompok pekerja berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran, namun belum terjadi perubahan sikap atau tindakan untuk memperjuangkan hak yang belum terpenuhi sehingga perlu pendampingan berkelanjutan.

c. Intervensi Makro

Tujuan dari intervensi makro adalah mendorong pemenuhan dan penguatan hak-hak normatif pekerja melalui pengusulan kebijakan di Dinas PU Provinsi DIY dan peningkatan kesadaran publik. Berdasarkan tujuan tersebut, hasil intervensi makro menunjukkan capaian awal yang sesuai dengan perencanaan yaitu praktikkan berhasil menyusun dan mengirimkan *policy brief* yang berisi permasalahan serta rekomendasi pemenuhan hak-hak normatif kepada Dinas PU Provinsi DIY sebagai bentuk advokasi kebijakan. Namun, proses intervensi belum dapat dilanjutkan pada tahap audiensi secara langsung dikarenakan keterbatasan waktu dan akses selama pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut,

kemudian dilakukan kampanye melalui media sosial sebagai upaya peningkatan kesadaran publik terhadap hak-hak normatif pekerja.

Kampanye media sosial dilakukan melalui akun Instagram dengan mengirimkan poster pengenalan hak-hak normatif pekerja, ciri-ciri ketidakadilan di tempat kerja dan pentingnya komunikasi dalam tim kerja. Poster tersebut di upload dengan tujuan memberikan edukasi kepada khalayak agar mengetahui pentingnya hak-hak normatif. Secara keseluruhan, intervensi makro yang telah dilakukan menghasilkan capaian berupa advokasi kebijakan secara tertulis dan peningkatan kesadaran publik yang ditandai dengan jumlah viewers sebanyak lebih dari 100 orang. Dampak bagi lingkungan klien yaitu sebagai langkah awal untuk mengusulkan pemenuhan hak-hak normatif yang belum terpenuhi dan menjadi jembatan lembaga dan klien untuk melakukan audiensi dengan Dinas PU Provinsi DIY.

D. Kesimpulan

Permasalahan yang terjadi secara garis besar merupakan permasalahan yang berkaitan dengan hak dasar pekerja. Maka dari itu diperlukan peningkatan kesadaran kelompok pekerja terhadap hak-hak normatif pekerja dan melakukan pengusulan pemenuhan hak normatif pekerja kepada Pemerintah atau pihak pemberi kerja yaitu Dinas PU Provinsi DIY.

Hasil dari intervensi yang telah dilakukan pada level mikro yaitu peningkatan kapasitas individu sebagai ketua tim kerja dengan mengatasi kecemasan dan konflik peran yang terjadi pada klien. Hasil intervensi kelompok adalah peningkatan pengetahuan dan kesadaran kelompok pekerja terhadap ketidakadilan di tempat kerja dan jenis-jenis hak normatif yang seharusnya diterima pekerja di lingkungan kerjanya. Hasil intervensi makro berdasarkan permasalahan klien adalah pengusulan kebijakan untuk memenuhi hak normatif pekerja yang belum terpenuhi, langkah

tersebut dilakukan untuk menjembatani proses advokasi lanjutan melalui audiensi.

Permasalahan pada setiap level yaitu pada level mikro, mezzo dan makro saling berkaitan dikarenakan setting intervensi yang dilakukan praktikkan berfokus pada kelompok pekerja. Sehingga permasalahan yang digali merupakan permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja klien. Keterbatasan dalam pelaksanaan intervensi adalah waktu pertemuan dengan klien, dikarenakan klien hanya dapat ditemui pada jam istirahat kerja selain jam tersebut para pekerja memiliki pekerjaan sampingan di lingkungan rumah masing-masing. Rata-rata pekerja memiliki lebih dari satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa belum semua pekerja mendapatkan haknya sebagai pekerja, terutama mengenai jaminan sosial, kontrak kerja tertulis dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang- Undangan

PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, dan Waktu Kerja.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Buku

Darna, I. Wayan. 2023. Pendidikan Karakter Tanggung Jawab Siapa?: Pentingnya Sinergi Rumah, Sekolah dan Masyarakat demi Membentuk Karakter Siswa. Nilacakra.

Irawan, Dr. Hermanu. 2024. Teori Kebijakan Publik. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Sujono, Hernandi. 2025. Teori Kepemimpinan untuk Generasi Milenial. Deepublish.

Internet

EBSCO. Role Conflict and Role Strain. Accessed December 31, 2025. <https://www.ebsco.com>.

Kasus Kecelakaan Kerja Tahun 2024, February 24, 2025. <https://data.go.id/dataset/kasus-kecelakaan-kerja-tahun-2024>

PSI. The Global Union Federation of Workers in Public Services, December 11, 2025. <https://publicservices.international>.

Rachman, Arrijal . Bank Dunia Soroti 'Booming' Pekerja Informal RI. CNBC Indonesia. Accessed November 12, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251008054059-4673785/bank-duniasoroti-booming-pekerja-informal-ri>

Serbuk Indonesia. Berani Berjuang Pasti Menang! "Tentang SERBUK Indonesia." Accessed November 11, 2025. <https://www.serbukindonesia.org/p/profilserbuk.html>.

Simplish. What Is Role Conflict? A Guide for How to Overcome It, December 28, 2023. <https://simplish.co/blog/role-conflict>.